



Artikel Penelitian



## ANALISIS PELAKSANAAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

Dewi Milandiah<sup>1</sup>, Novrikasari<sup>2</sup>, Haerawati Idris<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Received: Juni 26, 2022  
 Revised: Juli 01, 2022  
 Accepted: Juli 22, 2022  
 Available online: September 01, 2022

### KATA KUNCI

Kelompok Bina Keluarga Balita; Stunting

### KORESPONDENSI

Dewi Milandiah

E-mail: [milandiah\\_defard@yahoo.co.id](mailto:milandiah_defard@yahoo.co.id)

### A B S T R A K

**Latar Belakang:** Salah satu permasalahan gizi yang dihadapi dunia khususnya di negara-negara miskin dan berkembang adalah masalah anak pendek (stunting). Keberadaan kelompok Bina Keluarga Balita dengan cara membina tumbuh kembang anak dapat mempercepat penurunan pencegahan stunting sebagai upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi modal utama pembangunan dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kelompok bina keluarga balita dalam pencegahan stunting di Kabupaten Muara Jambi.

**Metode:** Desain studi menggunakan studi penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Sampel Penelitian berjumlah 13 informan. Pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Mestong di Puskesmas Tempino dan Puskesmas Pondok Meja pada bulan Maret Tahun 2022.

**Hasil:** Hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa Kelompok Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum terlaksana secara optimal, Tim Pendamping keluarga telah disusun namun SK nya belum di tanda tangani Kepala Daerah. Kader Bina Keluarga Balita sudah ada dan memenuhi kualifikasi, akan tetapi belum mendapatkan pembinaan dan pelatihan dalam pencegahan stunting. Anggaran biaya baru direalisasikan pada Bulan Juni Tahun 2022. Sarana Prasarana masih memerlukan perhatian lebih serius dalam menunjang proses berlangsungnya kegiatan Bina Keluarga Balita. Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas tidak >70% hanya 52,94% berarti Bina Keluarga Balita tidak terlaksana dengan baik.

**Kesimpulan:** Sangat di perlukan political will dan perhatian lebih serius dari Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Jambi dalam pencegahan stunting, terutama terkait pembinaan, pelatihan, pengalokasian anggaran daerah yang cukup khususnya intensif kader dan penyediaan sarana prasarana yang akan menunjang proses berlangsungnya kegiatan Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.

**Background:** One of the nutritional problems faced by the world, especially in poor and developing countries, is the problem of stunting. The existence of the Toddler Family Development group by fostering child growth and development can accelerate the reduction of stunting prevention as an effort to develop the quality of Human Resources (HR) which is the main capital of development by optimizing the growth potential of children.

**Objective:** This study aims to analyze the implementation of the family development group for toddlers in preventing stunting in Muara Jambi Regency.

**Methods:** The study design used a qualitative research study using a descriptive approach method. The research sample amounted to 13 informants. Collecting data using in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). This research was conducted in Mestong District at the Tempino Health Center and Pondok Table Health Center in March 2022.

**Results:** The results of the study based on in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) showed that the Toddler Family Development Group related to stunting prevention had not been implemented optimally, the Family Assistance Team had been prepared but the decree had not been signed by the Regional Head. The Toddler Family Development cadre already exists and meets the qualifications, but has not yet received guidance and training in stunting prevention. The new budget was realized in June 2022. Infrastructure facilities still require more serious attention in supporting the ongoing process of Toddler Family Development activities. Targets who have a good understanding of stunting in priority locations are not >70%, only 52.94%, meaning that the Toddler Family Development is not carried out properly.

**Conclusion:** Political will and more serious attention are needed from the Regional Head and the Muara Jambi Regency Government in preventing stunting, especially related to coaching, training, allocation of sufficient regional budgets, especially intensive cadres and provision of infrastructure facilities that will support the ongoing process of Community Development for Toddlers in preventing stunting.

### PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan gizi yang dihadapi dunia khususnya di negara-negara miskin dan berkembang adalah

masalah anak pendek (stunting) [1]. World Health Organization (WHO) Tahun 2014 dalam Global Nutrition Targets 2025, stunting dianggap sebagai suatu gangguan pertumbuhan irreversibel yang sebagian besar dipengaruhi oleh asupan nutrisi

yang tidak adekuat dan infeksi berulang selama 1.000 hari pertama kehidupan. Estimasi prevalensi Balita stunting di seluruh dunia sebesar 22 persen atau sebanyak 149,2 juta [2]. World Bank Tahun 2020 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. Stunting di Indonesia relatif masih tinggi, angka stunting secara Nasional ini mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen di Tahun 2019, menjadi sebesar 24,4 persen di Tahun 2020 [3].

Prevalensi stunting yang tinggi di dunia maupun di Indonesia akhir-akhir ini menyebabkan stunting banyak mendapat perhatian sebagai masalah kekurangan gizi kronis dalam bentuk anak pendek [4]. Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu tugas dan kontribusi nyata Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada Tahun 2030 [5]. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting dan menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia [6][7].

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya [8]. Seribu hari pertama kehidupan (periode emas) merupakan masa awal kehidupan saat masih berada dalam kandungan hingga 2 Tahun pertama kehidupan, menjadi sangat penting karena pada masa itu kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak sangat cepat dan pesat sehingga akan berdampak terhadap kesehatan pada masa yang akan datang. Kualitas generasi bangsa yang sehat dan cerdas salah satunya ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangan pada periode emas [9].

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan Kelompok unggulan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kelompok Bina Keluarga Balita merupakan salah satu layanan Pengembangan Anak Usia Dini yang memfokuskan kepada pembangunan ketahanan keluarga agar keluarga (khususnya orang tua) yang memiliki anak Balita dapat menyediakan dan menciptakan lingkungan pengasuhan yang ramah anak dan mempraktekan pengasuhan, sehingga anak Balitanya dapat mencapai prestasi pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Kelompok Bina Keluarga Balita saat ini sudah terintegrasi dengan layanan POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) dan PAUD yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia, dikenal dengan sebutan Bina Keluarga Balita Holistik

Integratif (BKB HI) yang menawarkan layanan aspek kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan [10].

Permasalahannya Provinsi Jambi masih menghadapi prevalensi stunting yang masih tinggi karena prevalensi stunting pada balita berdasarkan data Studi Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 masih lebih tinggi dibandingkan dengan standar WHO yaitu 30,1%. Terakhir untuk Kabupaten tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 44% di Kabupaten Kerinci sebesar 42,4%, sedangkan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 18,8%. Namun berdasarkan Survei Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) 2019, angka stunting di Provinsi Jambi turun menjadi 21,03% dan menjadi provinsi terbaik ke-5 di Indonesia. Di Provinsi Jambi, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka anak di bawah 5 tahun dengan stunting (tinggi badan menurut umur) adalah 22,4%, angka anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah 22,4%, berat badan untuk usia adalah 16,7%, persentase balita kurus (berat badan terhadap tinggi badan) adalah 9,1 persen [11]. Sedangkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2021, prevalensi tertinggi Balita stunting berdasarkan tinggi badan menurut umur 27,2 persen, di Kabupaten Muaro Jambi, prevalensi Balita underweight berat badan menurut umur 20,9 persen di Kabupaten Tebo dan prevalensi Balita wasted berat badan menurut tinggi badan 14,5 persen di Kabupaten Merangin. Provinsi Jambi diberikan mandat oleh Pemerintah Pusat untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 16 persen. Target nantinya di Tahun 2024 prevalensi stunting Indonesia diturunkan menjadi 14 persen [12].

Penelitian Mahisa Distya Putri, Sudarmiani, Udin Kurniawan Aziz (2019), dengan judul Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Kegiatan Bina Keluarga Balita Taman Posyandu Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Terhambatnya kegiatan Bina Keluarga Balita Taman Posyandu dikarenakan terbatasnya jumlah kader Bina Keluarga Balita [13].

Penelitian Ayunurahmawati Khoirunnizza (2019), dengan judul Pencegahan Children *Stunting* Melalui Kelompok Bina Keluarga Balita Studi Kelompok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Di Desa Wonoayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan anak *stunting*, salah satunya adalah kurangnya kesadaran orang tua dalam memenuhi status gizi dalam tumbuh kembang anak. Hal ini terlihat dari kebiasaan memberikan makanan yang bergizi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak *stunting* antara lain gizi buruk, faktor lingkungan, berat badan lahir rendah, kondisi ekonomi yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan gizi sebelum dan selama kehamilan dan setelah melahirkan [14].

Penelitian Justang Fariel Maulana (2021), dengan judul Analisis Pelaksanaan Kelompok Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita). Input dari kegiatan ini, bahwa antusiasme anggota keluarga terhadap kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Balita yang tinggi dan mendapat tanggapan yang baik, serta adanya beragam kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, namun terkadang tidak semua anggota keluarga dan kader bisa hadir pada saat pelaksanaan kegiatan, karena memiliki kesibukan tersendiri [15].

Data Aplikasi E-PPGBM dan Data Analisa Situasi Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2020 diketahui jumlah Balita stunting di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 1777 dan Tahun 2021 diketahui jumlah Balita stunting di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 1434. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dan analisis untuk memperoleh suatu pelaksanaan Kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data dan wawancara dengan petugas Kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah) dan SUB PPKBD di salah satu Kelompok Bina Keluarga Balita Kecamatan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021, diketahui adanya fakta yang mengindikasikan masih rendahnya partisipasi aktif kader dan kelompok Bina Keluarga BALITA. Fenomena ini dapat diketahui dimana masih tingginya ketergantungan kader terhadap petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader bina keluarga BALITA dalam pelaksanaan Kelompok Bina Keluarga Balita. Balita telah ditentukan dan orang tua BALITA telah memiliki jadwal tetap setiap bulannya. Fenomena lainnya, dari sarana tempat hanya berapa kelompok Bina Keluarga Balita yang terintegrasi dengan layanan POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) dan dikenal dengan sebutan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI).

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pelaksanaan Kelompok Bina Keluarga Balita Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan lebih mendalam tentang Pelaksanaan Kelompok Bina Keluarga Dalam Kelompok Bina Keluarga Balita Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini, peneliti mengundang beberapa informan di Kecamatan lokus Balita Stunting Kabupaten Muaro Jambi yaitu Kecamatan Mestong (Puskesmas Tempino dan Puskesmas Pondok Meja), Penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2022.

Beberapa informan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Muaro Jambi.
2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi.
3. Camat Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
4. Lurah/ Kepala Desa Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
5. PKB/PLKB Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
6. Ketua Kelompok Bina Keluarga Balita Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
7. Wakil Kelompok Bina Keluarga Balita Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
8. Sekretaris Kelompok Bina Keluarga Balita Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
9. Orang Tua Balita Stunting Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
10. Orang Tua Balita Tidak Stunting Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan Nomor 113/UN9.FKM/TU.KKE/2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen proses terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Kebijakan (Azwar, 2010). Berikut hasil penelitian yang diperoleh [17]:

**Tabel 1. Hasil Wawancara Informan**

INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi	Input	Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum terlaksana secara optimal, Tim Pendamping keluarga dalam pencegahan stunting telah disusun namun SK nya belum di tanda tangani Kepala Daerah. Kader sudah ada dan memenuhi kualifikasi, akan tetapi belum ada kader bina keluarga balita. Anggaran biaya baru direalisasikan pada Bulan Juni.
	Proses	Strategi operasional yang akan dilakukan adalah dengan membuat SK pendamping keluarga dan merencanakan anggaran untuk pengganti pulsa sebesar 100 ribu per bulan. Akan tetapi terkedala oleh SK Kabupaten yang belum di setujui oleh Bupati sampai saat ini. Pencatatan dan pelaporan menggunakan New SIGA dengan hasil data input tidak lengkap dan tidak terkontrol.
	Output	Sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tersedianya layanan intervensi sensitif dengan kategori indikator sasaran persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas tidak >70% hanya 52,94% berarti Bina Keluarga Balita Tidak Terlaksana Dengan Baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi diperoleh informasi bahwa memang kader masih kurang. Ada kelompok bina keluarga yang kosong kadernya dan ada juga yang hanya 1 orang, sehingga kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka kader tersebut kurang kompetisi, menumpuk beban kerjanya yang bisa membuatnya jenuh sehingga kinerjanya menurun yang menyebabkan koordinasi dengan Lurah/ Kepala Desa Kecamatan Mestong berkurang.

**Tabel 2. Hasil Wawancara Informan**

INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Input	Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum ada, tapi tim pendamping keluarga sudah ada. Kader berdasarkan jumlah dan kualifikasi sudah ada. Akan tetapi untuk pelatihan belum spesifik ke pencegahan stunting. Anggaran biaya hanya dari pusat, sedangkan untuk honor kader diberikan dari dana desa. Hanay ada tersedia satu kit stunting setiap satu kecamatan.
	Proses	Pengembangan kebijakan bina keluarga masih merujuk pada perpers 72, akan tetapi Strategi operasional masih dalam tahap diskusi saja. Akan tetapi terkedala oleh SK Kabupaten yang belum di setujui oleh Bupati sampai saat ini. Pencatatan dan pelaporan menggunakan New SIGA dengan hasil data input tidak lengkap dan tidak terkontrol. .
	Output	Sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tersedianya layanan intervensi sensitif dengan kategori indikator sasaran persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas tidak >70% hanya 52,94% berarti Bina Keluarga Balita Tidak Terlaksana Dengan Baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh kader Bina Keluarga Balita berperan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita Taman Posyandu namun terdapat banyak kegiatan yang belum maksimal bahkan belum terlaksana dan sebagian kegiatan inti sudah terlaksana. Terhambatnya kegiatan Bina Keluarga Balita Taman Posyandu dikarenakan terbatasnya jumlah kader Bina Keluarga Balita.

**Tabel 3. Hasil Wawancara Informan**

	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
Camat Kecamatan Mestong	Input	Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum ada, tapi tim pendamping keluarga sudah ada. Pemberian insentif sudah ada pada kader dan akan terus diberi penambahan setiap tahunnya. Belum ada kit stunting.
	Proses	Rujakan dalam penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengembangan kebijakan dan strategi operasional kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum ada. Semua di kelola oleh desa masing-masing. Karena belum ada anggaran

		untuk pencegahan stunting. Pencatatan dan pelaporan pun tidak ada.
	Output	Sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tersedianya layanan intervensi sensitif dengan kategori indikator sasaran persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas tidak >70% hanya 52,94% berarti Bina Keluarga Balita Tidak Terlaksana Dengan Baik

Pengembangan kebijakan bina keluarga masih merujuk pada perpers 72, akan tetapi Strategi operasional masih dalam tahap diskusi saja. Akan tetapi terkedala oleh SK Kabupaten yang belum di setuju oleh Bupati sampai saat ini. Pencatatan dan pelaporan menggunakan New SIGA dengan hasil data input tidak lengkap dan tidak terkontrol

**Tabel 4. Hasil Wawancara Informan**

INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
Lurah/ Kepala Desa Kecamatan Mestong	Input	Bina keluarga untuk pencegahan stunting sudah ada mulai dari tahun 2021, dengan jumlah kader sebanyak 6 orang. Akan tetapi jumlah kader ini belum cukup merata mengingat Kecamatan Mestong terdiri dari 12 RT. Kualifikasi pemilihan kader bisa baca tulis dan dekat dengan masyarakat. Pelatihan kader belum ada dan insetif diberikan dari dana desa sebesar 50 ribu setiap bulan dan akam terus di ajukan untuk penambahan jumlah insetif. Sarana prasarana belum ada dan masih bergabung dengan posyandu.
	Proses	Belum ada kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader desa yang membuatkan SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.. kerjasama lintas sektor, pembinaan, monitoring dan evaluasi juga belum ada.. Serta pencatatan dan pelaporan bina keluarga belum lengkap
	Output	Sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tersedianya layanan intervensi sensitif dengan kategori indikator sasaran persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas tidak >70% hanya 52,94% berarti Bina Keluarga Balita Tidak Terlaksana Dengan Baik

Bentuk kegiatan program BKB adalah pertemuan penyuluhan oleh kader BKB, penyuluhan dilakukan minimal satu kali sebulan kurang lebih berdurasi 90 menit. Materi penyuluhan disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun. Tempat kegiatan dilaksanakan dikelompok BKB (disepakati antara kader dan anggota kelompok BKB). Akan tetepi berdasarkan hasil penelitian program BKB hanya dilaksanakan sekali sebulan dan itupun masih mengikuti program posyandu dengan keterbatasan sarana prasarana.

**Tabel 5. Hasil Wawancara Informan**

INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
Koordinator PKB/PLKB	Input	Bina keluarga untuk pencegahan stunting sudah ada dan terdiri dari 6 kader. Tetapi hanya fokus pada 1 tempat saja yaitu Angrek 1. kualifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh kader kelompok Bina Keluarga Balita bisa membaca dan bekerjasama. Pelatihan dilaksanakan pada kader dan insetif diberikan dari dana desa sebesar 50 ribu setiap bulan. Kegiatan ini didukung oleh masyarakat.
	Proses	Sudah ada kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader desa yang membuatkan SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.. BKB kit juga tidak ada. kerjasama lintas sektor, pembinaan, monitoring dan evaluasi juga belum ada. Serta pencatatan dan pelaporan bina keluarga belum lengkap

	Output	Balita sehat. Sedangkan dari observasi PLKB tidak fokus menangani kelompok BKB
--	--------	--

Pelatihan kader BKB, dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu terkait pola asuh balitanya meningkat.

**Tabel 6. Hasil Wawancara Informan**

No	INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
1	Ketua Kelompok Bina Keluarga Balita	Input	Ketua BKB lulusan sarjana pendidikan, sudah ada bina keluarga yang terdiri dari 5 kader. Kegiatan BKB di sertakan dengan posyandu. Kualifikasi kader adalah yang bisa di ajak kerja sama. Kemampuan kader kelompok Bina Keluarga Balita yang ada saat ini sudah baik. Dana anggaran belum jelas dan tidak ada.
		Proses	Ada buku pedoman tentang kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader desa yang membuat SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.. kerjasama lintas sektor, pembinaan, monitoring dan evaluasi juga belum ada.. Serta pencatatan dan pelaporan bina keluarga belum lengkap
		Output	Bina keluarga tidak berjalan dengan lancar, karena banyaknya kekurangan dan hambatan yang dihadapim oleh ketua kelompok. salah satunya adalah tidak adanya dukungan sarana prasarana dalam kegiatan bina keluarga untuk pencegahan stunting.
2	Ketua Kelompok Bina Keluarga Balita	Input	Ketua BKB lulusan sarjana pendidikan, sudah ada bina keluarga yang terdiri dari 5 kader. Kegiatan BKB di sertakan dengan posyandu. Kualifikasi kader adalah yang bisa di ajak kerja sama. Kemampuan kader kelompok Bina Keluarga Balita yang ada saat ini sudah baik. Dana anggaran belum jelas dan tidak ada.
		Proses	Ada buku pedoman tentang kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader desa yang membuat SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting kerjasama lintas sektor, pembinaan, monitoring dan evaluasi juga belum ada.. Serta pencatatan dan pelaporan bina keluarga belum lengkap
		Output	Bina keluarga tidak berjalan dengan lancar, karena banyaknya kekurangan dan hambatan yang dihadapim oleh ketua kelompok. salah satunya adalah tidak adanya dukungan sarana prasarana dalam kegiatan bina keluarga untuk pencegahan stunting.

Indikator keberhasilan pelaksanaan kelompok bina keluarga balita dalam pencegahan stunting. Pelaksanaan kelompok bina keluarga balita dalam pencegahan stunting belum berhasil dan ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kejadian stunting.

**Tabel 7. Hasil Wawancara Informan**

INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
Wakil Ketua Kelompok Bina Keluarga Balita	Input	Ketua BKB lulusan sarjana pendidikan, sudah ada bina keluarga yang terdiri dari 5 kader. Kegiatan BKB di sertakan dengan posyandu. Kualifikasi kader adalah yang bisa di ajak kerja sama. Kemampuan kader kelompok Bina Keluarga Balita yang ada saat ini sudah baik. Dana anggaran belum jelas dan tidak ada.
	Proses	Belum ada buku pedoman tentang kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader, desa yang membuat SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum ada pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan PLKB pada kelompok Bina Keluarga Balita kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi juga belum ada.. Serta pencatatan dan pelaporan bina keluarga belum lengkap
	Output	Balita sehat dan tidak stunting atas dukungan dari orang tua. Pengembangan kebijakan, sarana KIT, kerjasama lintas sektor, pembinaan, monitoring dari PLKB belum ada, akan tetapi pencatatan pelaporan lengkap.

Jika dilihat dari kualitasnya, kelima kader sudah memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari program Bina Keluarga Balita Kualifikasi dari kelima kader tersebut adalah bisa membaca, menulis, bekerjasama dan dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, kelima kader ini belum mendapat pelatihan dari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan pernyataan dari kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi bahwa pelatihan Bina Keluarga Balita belum ada, hanya ada pelatihan tim pendamping keluarga.

**Tabel 8. Hasil Wawancara Informan**

INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
Sekretaris Bina Keluarga Balita	Input	Ketua BKB lulusan sarjana pendidikan, sudah ada bina keluarga yang terdiri dari 7 orang.. Kegiatan BKB di sertakan dengan posyandu. Kualifikasi kader adalah yang bisa di ajak kerja sama. Pelatihan sudah ada tentang gizi anak dan stunting. Dana anggaran diberikan berupa insentif pada kader sebesar 60 ribu yang didapat dari dana desa. Saranan hanya ada APE.
	Proses	Belum ada buku pedoman tentang kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader, desa yang membuatkan SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum ada pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan PLKB pada kelompok Bina Keluarga Balita kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi juga belum ada.. Serta pencatatan dan pelaporan bina keluarga belum lengkap
	Output	Balita sehat dan tidak stunting atas dukungan dari orang tua. Pengembangan kebijakan, sarana KIT, kerjasama lintas sektor, pembinaan, monitoirng dari PLKB belum ada, akan tetapi pencatatan pelaporan lengkap.

Dukungan dari segi kesiapan sarana (tempat) dan prasarana (Media Penyuluh Alat Permainan Edukatif)) untuk pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum ada, tempat pelaksanaan masih menyatu dengan posyandu.

**Tabel 9. Hasil Wawancara Informan**

NO	INFORMAN	VARIABEL	HASIL WAWANCARA
1	Orang Tua Balita Stunting	Input	Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum ada, tapi tim pendamping keluarga sudah ada. Kader berdasarkan jumlah dan kualifikasi sudah ada. Akan teteapi untuk pelatihan belum spesifik ke pencegahan stunting.
		Proses	Belum ada buku pedoman tentang kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader, desa yang membuatkan SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum ada pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh Bina Keluarga Balita. Pencatatan dan pelaporan terkait pendaftaran kelompok bina keluarga.
		Output	Tidak ada kegiatan bina keluarga
2	Orang Tua Balita Stunting	Input	Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum ada, tapi tim pendamping keluarga sudah ada. Kader berdasarkan jumlah dan kualifikasi sudah ada. Akan teteapi untuk pelatihan belum spesifik ke pencegahan stunting.
		Proses	Belum ada buku pedoman tentang kebijakan dan strategi tentang pencegahan stunting. Pemilihan kader, desa yang membuatkan SK kerja. Belum ada anggaran untuk kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum ada pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh Bina Keluarga Balita. Pencatatan dan pelaporan terkait pendaftaran kelompok bina keluarga.
		Output	Tidak ada kegiatan bina keluarga
3	Orang Tua Balita Tidak Stunting	Input	Ada bina keluarga yang menyatu dengan kegiatan posyandu. Tidak ada bantuan yang diberikan pada pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.

		Proses	Tidak ada pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.
		Output	Tidak ada pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.
4	Orang Tua Balita Tidak Stunting	Input	Ada bina keluarga yang menyatu dengan kegiatan posyandu. Tidak ada bantuan yang diberikan pada pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.
		Proses	Tidak ada pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting secara mandiri.
		Output	Tidak ada pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting secara mandiri.

Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita Di Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum optimal secara kegiatan dan keanggotaan serta tidak terintegrasi dengan posyandu dan paud. Pelaksanaan BKB tidak efektif karena kurangnya kerja sama sektor dinas terkait dan juga mitra kerja seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan dalam mensosialisasikan program Bina Keluarga balita holistik integratif di masing-masing desa di Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya BKB-HI juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

**Tabel 10 Hasil Focus Group Discussion (FGD)**

Tema	Informan 14	Informan 15	Informan 16	Informan 17	Informan 18
<b>Input</b>	Kami kader baru bu, gawe kami cuma nyatat, kami di BKB dalam Cuma berduo la samo ibu ketuo, sayo cuma tamatan SD bae, tempat kami masih numpang	Kami dak tau tentang stunting dak pernah di kasih bimbingan, Ado meja punyo posyandu, meja kami pinjam posyandu la. Mau nulis meja dak do, pinsil bawa sendiri dak do. Duduk di lantai	Dak ado barang kami mainan lamo la	Kami butuh tikar karpet selamo ni duduk dilantai kotor la	Diam
<b>Proses</b>	Tidak ado, kami baru bu jadi dak pernah nengok buku pedoman dan buku petunjuk, habis nyatat kami balek la, buku satu tuch la table gitu na pinjam buku posyandu trus nyalin gitu be	Dak ado, kami butuh buku penyuluhan	Dak ado buku pedoman	Dak ado	Dak ado
<b>Output</b>	Indikator keberhasilan Bina Keluarga Balita dak tau kami	Dak tau	Dak tau	Dak tau	Dak tau
<b>Interprestasi</b>	<p><b>Input:</b> keterlibatan kader yang berkaitan dengan pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Balita dalam Pencegahan Stunting hanya mencatat, memberikan penyuluhan dan memantau tumbuh kembang anak balita. Kader juga memerlukan sarana prasarana untuk pelaksanaan BKB seperti tempat, meja, ATK, karpet tempat bermain anak dan speaker. Karena sampai saat ini masih bergabung dan menggunakan perlengkapan posyandu.</p> <p><b>Proses:</b> Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan strategi operasional kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting tidak ada. Sehingga Pembinaan dan pelatihan untuk menambah pengetahuan kader BKB juga belum ada.</p> <p><b>Output:</b> Pemerintah khusus nya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berharap dengan adanya Kelompok Bina Keluarga Balita anak yang kurang sehat meningkat menjadi sehat, fakta dilapangan anak yang sehat bisa menjadi stunting bila potret kondisi pelaksanaan Bina Keluarga Balita masih belum maksimal.</p>				

## 1. Pelaksanaan Kelompok Bina Keluarga Balita Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Faktor Input.

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Maksudnya, bahwa dalam pencapaian tujuan tersebut menekankan faktor manusia sebagai faktor utama yang melakukan kegiatan dan aktifitas [16].

Program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan layanan sosialisasi atau penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak umur 0 sampai 5 tahun melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, spiritual, emosional, sosial dan moral untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kader merupakan faktor penting dalam keberhasilan Bina Keluarga Balita [6].

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program Bina Keluarga Balita dapat dinilai dari kualitas dan kuantitasnya. Dari hasil penelitian, kuantitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari jumlah kader di Kecamatan Mestong yaitu sebanyak 6 kader.

Jika dilihat dari kualitasnya, kelima kader sudah memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari program Bina Keluarga Balita Kualifikasi dari kelima kader tersebut adalah bisa membaca, menulis, bekerjasama dan dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, kelima kader ini belum mendapat pelatihan dari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan pernyataan dari kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi bahwa pelatihan Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum ada, hanya ada pelatihan tim pendamping keluarga.

Menurut hasil penelitian Niken (2014), pelatihan kader Bina Keluarga Balita, dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu terkait pola asuh balitanya meningkat. Keberadaan sumber daya sangat mendukung keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tanpa adanya sumber daya yang menunjang seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran, informasi yang cukup serta kewenangan implementasi yang dibuat sulit untuk mencapai sasaran [18].

.....” Kita melakukan penyuluhan kebawah, terhadap pembinaan keluarga balita melalui bidang ketahanan

keluarga termasuk juga kepesertaannya didalam eee mengatur keturunan.. sudah kita lakukan semua. Alhamdulillah.. tapi kalo Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum.” (Indepth Infroman 1).

.....”Kalo kader Bina Keluarga Balita ni kan belum begitu kito arahkan masalah stunting tapi kito ado namonyo tim pendamping keluarga, nah tuch sudah terbentuk memang ” (Indepth Infroman 2).

.....”Ada kemaren ketua yang pergi, tapi ketua belum ada informasikan pelatihan apa. Kemaren nya lagi Tahun lalu 2021 pas di Kantor Balai desa kami damping bu ketua cuman. Kata nya untuk BKB tapi arahnya tuch bukan khusus BKB. BKB, BKR, BKL. Diambil 2 orang 2 orang gitu jadi nggak full buat BKB gitu pelatihannya di gabung. Begabung gitu na materinyo, BKB, BKR, BKL. Materi nya tentang pencegahan stunting cuman kami bilang nanti kalo BKB mesti ada eee bantuan makanan, kami nanyain tempat kami ada yang stunting kurang perkembangannya cuman masukannya nanti ya di ituin ke bidan kayak gituna, di larikan ke bidan desa. Pendamping bidan dari desa jadi kalo ada yang stunting ibu tuch la yang ngurus (Indepth Infroman 8)..

Hasil penelitian Surati (2015) memberikan kesimpulan bahwa pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan kader dalam memecahkan masalah asuhan dini tumbuh kembang anak balita sehingga peneliti dapat memberikan saran untuk mengembangkan penelitian ini dengan memberikan pelatihan kepada pengelola, kader dan orang tua anak balita.

Pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita dengan memberdayakan kader Bina Kader Balita yang berasal dari masyarakat. Kader dalam melaksanakan pembinaan tentang penerapan asuhan dini tumbuh kembang balita terhadap para orang tua/keluarga anak balita perlu menguasai dan menggunakan berbagai metode yang sesuai. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah konseling kelompok, namun sampai saat ini kader Bina Keluarga Balita belum diberi kemampuan melaksanakan konseling kelompok.

Bentuk kegiatan program Bina Keluarga Balita adalah pertemuan penyuluhan oleh kader Bina Keluarga Balita, penyuluhan dilakukan minimal satu kali sebulan kurang lebih berdurasi 90 menit. Materi penyuluhan disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun. Tempat kegiatan dilaksanakan dikelompok Bina Keluarga Balita (disepakati antara kader dan anggota kelompok Bina Keluarga Balita). Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian program Bina Keluarga Balita hanya dilaksanakan sekali sebulan dan itupun masih mengikuti program posyandu dengan keterbatasan sarana prasarana.

.....”Kami dalam eee setiap kegiatan posyandu menggunakan Kartu KKA, KKA ini ya. Dimana kartu KKA ini kan untuk melihat pertumbuhan kembangan anak, jadi eee setiap kita 9ombin ke posyandu lalu ibu-ibu meMbawa anak balita nya ke tempat kita, kita tanyakan tuch, eehm usia anak berapa. Nanti kita ada ininya bu, ada buku KKA, itu untuk panduan misalnya eee di usia 4 bulan apakah anak sudah 9 bisa miring atau belum kayak gitukan, jika sudah anak itu sesuai pertumbuhan eee perkembangan anak pada usianya. Lalu kita berikan lagi untuk tugas selanjutnya yaitu bulan ke 5 nya ya, eee untuk anak yang ke 5 bulan eee ajari anak

meraih barang di hadapannya seperti buku dalam panduan kami (Indepth Infroman 8).

.....”Ado bu, berapo nyo dak tau, soalnyo samo dengan posyandu. Ado kader posyandunyo, bingung mano yang Bina Keluarga Balita nyo. Kalo orang kesehatan kader nyo dak ado, dak ado penyuluhan bu cuma nyatet habis anak sayo di timbang trus nanyo anak nyo sudah biso apo be (Indepth Infroman 11).

Pelaksanaan program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI) di Indonesia saat ini masih mengalami beberapa kendala yaitu Kurangnya komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam Program BKB-HI. Ketersediaan Sumber dana dalam melaksanakan program masih kurang optimal. Sementara itu pada tahun 2017 pemerintah Indonesia melalui BKKBN mengaktifkan kembali program BKB-HI sebagai bagian dari program kampung keluarga berencana. Akan tetapi masih terdapat beberapa desa di Indonesia yang belum memasukkan program BKB ke dalam anggaran dana desa yang menyebabkan kebijakan BKB-HI tidak dilaksanakan dengan optimal.

.....”Untuk BKB khusus stunting baru direncanakan ini dan belum di belanjakan karna uangnya baru bisa di realisasikan pada Bulan Juni ini. Kita mau belanjakan apo..sementara stunting di hitung dari Januari sampai Desember ini, sampai Tahun 2024, apa yang mesti kita lakukan (Indepth Infroman 1).

.....”Dana untuk Bina Keluarga ini kalo khusus dari OPD itu dalam bentuk pembinaan ado tapi sifatnyo dari pusat yang adonyo tuch, yang dari kabupaten Alhamdulillah belum. Haha. (Indepth Infroman 2).

Dukungan dari segi kesiapan sarana (tempat) dan prasarana (Media Penyuluh Alat Permainan Edukatif) untuk pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting belum optimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa informan:

.....”Di realisasikan pada Bulan Juni ini. Sarana pengukuran tinggi badannya belum ada, lingkaran kepala belum ada yang untuk pembinaan keluarga balita ini tadi. Kit nya tidak ada, jadi di lapangan mau melaksanakan apa (Indepth Infroman 1).

.....”Fasilitas memang minim nian, mulai dari anggaran, dari fasilitas masih jauh la. Malah sudah pernah kito anggarkan tapi dak do masuk gitukan di coret (Indepth Infroman 2).

## 2. Pelaksanaan Kelompok Bina Keluarga Balita Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Faktor Proses.

Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita Di Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum optimal secara kegiatan dan keanggotaan serta tidak terintegrasi dengan posyandu dan paud. Pelaksanaan Bina Keluarga Balita tidak efektif karena kurangnya kerja sama sektor dinas terkait dan juga mitra kerja seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan dalam mengsosialisasikan program Bina Keluarga balita holistik integratif di masing-masing desa di Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu

rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya BKB-HI juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

Rujukan dalam penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengembangan kebijakan dan strategi operasional kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting juga tidak jelas, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama informan:

.....”Jadi kalo saya lihat kita kan stunting nich ribut tadinya covid 19 kemudian stunting seolah - olah seperti apa dunia ini sudah. Dan juga di tetapkan lah kabupaten muaro jambi stuntingnya itu 27.02% setelah saya mengamati semua indikator yang ada didalam stunting maka dinas PPKB ini masuk kedalam Bina Keluarga Balita, maka buatlah pendamping keluarga, kita buatlah SK pendamping keluarga sudah kita putuskan, sudah kita berikan kemudian kita usulkan ada anggaran yang tersedia yaitu hanya untuk pengganti pulsa kuota sebanyak satu bulan itu 100 rb. Tetapi, apakah pemberian kuota ini memiliki signifikan dalam penurunan stunting, Saya mau tanya Uang nya 1,9 miliar loh, satu tahun itu. Ketika orang saya berikan pulsa hanya melaporkan saja, apakah itu mampu memberikan pembinaan kepada keluarga balita. Paling hanya mengirim data, berapa capaian jumlah balita, batita dan semua. Tidak kepada intervensi asupan apa yang di berikan kepada dia karna itu bagiannya ibu bayi di kesehatan. Rumah tidak layak huni, sanitasi dasar yang rendah, apa pengaruhnya. Kalo misalnya yang 1,9 milyar ini kemarin kita berikan intervensi kepada yang kita duga beresiko stunting, kan lebih signifikan. Pemberian makan tambahan, pengaturan pola gizi jadikan lebih dekat dio dengan penurunan stunting itu. Tapi kalo saya diberikan pulsa, hanya sekedar untukmelaporkan satu bulan 100 rb, kuota. Apakah bisa kuota ini menurunkan stunting, cuma menyampaikan laporan stunting, tidak signifikan terhadap kasus yang mau di tangani. Ini yang membuat saya, saya bukannya marah ya, kalo memang kita apa nama nya ya, serius, kan disitukan ada di katakan ketika anak bayi lahir kurang dari 48 centi kemudian beratnya kurang dari 2,5 kilo gram, dinas kesehatan langsung putuskan itu stunting. Saya menganggap itu beresiko stunting, knapa demikian karna dari 0 hari sampai 2 tahun kita intervensi, ketika dia sudah kita intervensi, apakah di usia dua tahun lebih itu nanti dia masih tidak memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan usia. Berat badan panjang badan/tinggi kalo misalnya itu tidak terpenuhi baru kita vonis ini stunting. Intervensi ketika stunting lain lagi, lain dengan yang beresiko, beresiko kan

*belum stunting tu, masih beresiko stunting. Nah sekarang petunjuk dan seperti itu secara detail di dalam semua yang saya baca - baca tidak ada. Sekarang saya tanya lagi, anaknya sehat tubuhnya ok tapi sanitasi dasarnya jelek, apakah itu bisa kita golongkan stunting, nggak bisa tapi dalam indikator. Ketika salah satu dari dua puluh indikator itu tidak terpenuhi, iya itu stunting. Terus saya juga sampai hari ini, bukan tidak mempercayai dinas kesehatan. Ketika ditetapkan berdasarkan SSGI (Indept Informan 1).*

Dua penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan program BKB saat ini. Penelitian pertama oleh Resti Fauziah, dkk yang berjudul "Efektifitas Program Bina Keluarga Balita di Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler". Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pelaksanaan program bina keluarga balita di Kecamatan Bojongloa Kaler kelompok BKB hanya berjumlah 5 kelompok bahkan tidak semua kelurahan memiliki kelompok BKB permasalahan mengenai pelaksanaan program BKB diantaranya: 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program BKB, 2) Kurangnya peran serta masyarakat terhadap program BKB, 3) Jumlah koordinator lapangan sangat terbatas.

Penelitian selanjutnya oleh Artika, dkk. Dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita Di Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes" dengan menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Menyebutkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB belum optimal.

Hasil penelitian dari Justang Fariel Maulana (2021) dapat disimpulkan bahwa input dari kegiatan ini, bahwa antusiasme anggota keluarga terhadap kegiatan penyuluhan BKB yang tinggi dan mendapat tanggapan yang baik, serta adanya beragam kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, namun terkadang tidak semua anggota keluarga dan kader bisa hadir pada saat pelaksanaan kegiatan, karena memiliki kesibukan tersendiri. Proses dari kegiatan ini, bahwa pelaksanaan BKB sudah rutin dilakukan. Pencatatan dan pelaporan kegiatan juga sudah terlaksana dengan baik, namun dalam pertemuan/penyuluhan yang dilakukan lebih fokus kepada peningkatan kualitas dan pengetahuan kader saja. Output dari kegiatan ini, bahwa pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Balita sudah lebih paham mengenai tumbuh kembang anak, namun untuk peningkatan jumlah anggota

keluarga yang ikut penyuluhan Bina Keluarga Balita belum optimal [3].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi menyebutkan bahwa strategi operasional yang akan dilakukan adalah dengan membuat SK Tim Pendamping Keluarga dalam pencegahan stunting dan merencanakan anggaran untuk pengganti pulsa sebesar 100 ribu per bulan. Akan tetapi terkedala oleh SK tersebut yang belum di setujui oleh Kepala Daerah sampai saat ini. Pencatatan dan pelaporan menggunakan New SIGA dengan hasil data input tidak lengkap dan tidak terkontrol.

Pengembangan kebijakan bina keluarga masih merujuk pada Pepses 72 Tahun 2021, akan tetapi Strategi operasional masih dalam tahap diskusi saja. Terkedala oleh SK Kabupaten yang belum di setujui oleh Kepala Daerah sampai saat ini. Pencatatan dan pelaporan menggunakan New SIGA dengan hasil data input tidak lengkap dan tidak terkontrol (Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)

*....."Adonyo buku administrasi la setahu sayo, dari kader dak ado dari kabupaten. Koordinator PKB/PLKB di lapangan masing- masing wilayah yang urus (Informan 3).*

*....."Buku yang kami catat Cuma ngambil buku KIA, kartu- kartu KKA nggak ada (Informan 5).*

### **3. Pelaksanaan Kelompok Bina Keluarga Balita Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Faktor Output.**

Hasil indikator sasaran dan target pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tersedianya layanan intervensi sensitif dengan kategori indikator sasaran persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas tidak >70% hanya 52,94% berarti Bina Keluarga Balita Tidak Terlaksana Dengan Baik di Kabupaten Muara Jambi.

Bina keluarga tidak berjalan dengan lancar, karena banyaknya kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh ketua kelompok, salah satunya adalah tidak adanya dukungan sarana prasarana dalam kegiatan Bina Keluarga Balita untuk pencegahan stunting.

Penelitian Mahisa Distya Putri, Sudarmiani, Udin Kurniawan Aziz (2019), dengan judul Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Kegiatan Bina Keluarga Balita Taman Posyandu Desa Sedarat Kecamatan Balong

Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh kader Bina Keluarga Balita berperan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita Taman Posyandu namun terdapat banyak kegiatan yang belum maksimal bahkan belum terlaksana dan sebagian kegiatan ini sudah terlaksana. Terhambatnya kegiatan Bina Keluarga Balita Taman Posyandu dikarenakan terbatasnya jumlah kader Bina Keluarga Balita [20].

Program Bina Keluarga Balita sebagai pendukung para ibu dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya berperan penting untuk membantu ibu-ibu dan keluarga yang memiliki anak balita dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Ibu-ibu juga lebih mengerti dan paham mengenai pola asuh yang baik bagi anak-anaknya. Melalui pemberian gizi yang memadai, perawatan kesehatan, dan pelayanan pendidikan yang merangsang tumbuhnya kreativitas anak merupakan salah satu cara pola asuh yang baik bagi anak. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera [11].

## SIMPULAN

Unsur input Man (Bina Keluarga Balita kaitannya dengan pencegahan stunting belum terlaksana secara optimal, Tim Pendamping keluarga dalam pencegahan stunting telah disusun namun SK nya belum di tanda tangani Kepala Daerah. Kader Bina Keluarga Balita sudah ada dan memenuhi kualifikasi, akan tetapi belum mendapatkan pembinaan dan pelatihan dalam pencegahan stunting. Money (Anggaran biaya baru direalisasikan pada Bulan Juni Tahun 2022, memerlukan pengalokasian anggaran daerah yang cukup khususnya intensif kader) dan Material (Penyediaan sarana prasarana masih memerlukan perhatian lebih serius dalam menunjang proses berlangsungnya kegiatan Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting). Unsur Proses (Strategi operasional yang akan dilakukan adalah dengan membuat SK Tim pendamping keluarga dalam pencegahan stunting dan merencanakan anggaran untuk pengganti pulsa sebesar 100 ribu per bulan. Akan tetapi terkedala oleh SK Tim Pendamping Keluarga yang belum di setujui oleh Kepala Daerah sampai saat ini. Pencatatan dan pelaporan menggunakan New SIGA dengan hasil data input tidak lengkap dan tidak terkontrol). Unsur Output (Sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tersedianya layanan intervensi sensitif dengan

kategori indikator sasaran persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas tidak >70% hanya 52,94% berarti Bina Keluarga Balita tidak terlaksana dengan baik dalam pencegahan stunting di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022).

Sangat di perlukan political will dan perhatian lebih serius dari Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi serta tindakan yang lebih lanjut yang progresif sehingga program-program yang hendak dicapai bisa tercapai dan mengalami progress yang lebih baik dengan cara peningkatan kualitas dari kader dan petugas Bina Keluarga Balita sehingga anak-anak balita bisa lebih di perhatikan.. Perlu adanya perhatian lebih serius dalam pengalokasian anggaran daerah yang cukup khususnya intensif kader dan penyediaan sarana prasarana yang akan menunjang proses berlangsungnya kegiatan Bina Keluarga Balita dalam pencegahan stunting.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muaro Jambi, PKB/PLKB Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Ketua Kelompok Bina Keluarga Balita Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Serta seluruh pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bhutta, Z. A., Das, J. K., & Rizvi. The Lancet Nutrition Interventions Review Group, and the Maternal and Child Nutrition Study Group. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? (vol 382, pg 452, 2013). *Lancet*. 2013;382(9890), 396-396.
- [2] International Food Policy Research Institute. The 2016 Global Nutrition Report. IFPRI: Washington DC. (2016)
- [3] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta Bandung. (2016). H 241.
- [4] T. Sudargo, T. A. Rutasari dan A Affiah. 1000 Hari Pertama Kehidupan, Gadjah Mada University Press. (2018). H 1-5.
- [5] Fikawati, S. Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. (2019). Faculty of Public

- Health, Department of Public Health Nutrition  
<https://scholar.ui.ac.id/en/publications/analisis-faktor-faktor-risiko-terhadap-kejadian-stunting-pada-bal>
- [6] Ayu Nurahmawati Khoirunnizza. Pencegahan Children *Stunting* Melalui Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Studi Kelompok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Desa Wonoayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang), (2019). <https://eprints.umm.ac.id/45921/>
- [7] Dwi Muhammad Furqon, Kismartini Kismartini, Fathurrohma. Evaluasi Kinerja Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kelompok BKB Mekar Sari 2 Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. (2021). DOI: 10.14710/jppmr.v3i2.5084
- [8] Justang Fariel Maulana. . Analisis Pelaksanaan Kelompok Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita) DOI: [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6778](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6778)
- [9] Zulaikha, Yuli, Yuanita Windusari, and Haerawati Idris. 2021. "The Analysis of Implementation of Stunting Prevention Kelompok Case Study at the Air Beliti Community Health Center, Tuah Negeri District , Musi Rawas Regency, (2021) DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3007>
- [10] Leroy JL, Frongillo EA. Perspective: What Does Stunting Really Mean? A Critical Review of the Evidence. *Adv Nutr.* 2019;10 (2):196–204.
- [11] Pradnyawati LG, Juwita DAPR, Reviani N. Risk Factors of Stunting in Kedisian, Gianyar District, Bali, Indonesia. *J Berk Epidemiol.* 2021;9(3):266.
- [12] Bloem MW, Pee SD, Hop LT, Khan NC, Laillou A, Minarto, Pfanner RM, Soekarjo D, Soekirman, Solon JA, Theory C, Wasantwisut E, (2013). Key strategies to further reduce stunting in Southeast Asia: Lessons from the ASEAN countries workshop. *Food and Nutrition Bulletin*
- [13] Buletin Jendela Data dan Informasi. Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia. (2018). Jakarta: Pusat Data dan informasi.
- [14] Tentama, Fatwa et al. Penguatan Keluarga Sebagai Upaya Menekan Angka Stunting Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.* (2018). Vol. 2,
- [15] Pradnyawati LG, Sanjaya PKA. Pemberdayaan Kader Bina Keluarga Balita Dalam Pencegahan Stunting Dan. 2020;2(1):37–45.
- [16] Himawati EH, Fitria L. Hubungan Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia di Bawah 5 Tahun di Sampang. *J Kesehat Masy Indones.* 2020;15(1):1.
- [17] Rhamadani RA, Noviasty R, Adrianto R. Underweight, Stunting, Wasting Dan Kaitannya Terhadap Asupan Makan, Pengetahuan Ibu, Dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan. *J Ris Gizi.* 2020;8 (2):101–6.
- [18] Pradnyawati LG, Kartinawati KT, Ratna Juwati DAP. Parenting pattern of feeding in stunting toddlers at the working area of Tegallalang I Primary Health Centre. *J Community Empower Heal.* 2019;2 (2):208–16.
- [19] Kemenkes RI. Buletin Stunting. Kementerian Kesehat RI. 2018;301 (5):1163–78.
- [20] Setiawan E, Machmud R, Masrul M. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. *J Kesehat Andalas.* 2018;7(2):275.